

TUGAS AKHIR

PERAN PENILAI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA

JEFFRI

8160302240005



MAGISTER MANAJEMEN PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS

MAKASSAR

2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Penilai Pemerintah dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Intan Jaya, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut, serta upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan peran Penilai Pemerintah dalam pengelolaan BMD.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah tujuh orang yang terdiri atas Kepala BPPKAD, Kepala Bidang Aset Daerah, Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Staf Bidang Aset Daerah, Sekretaris BPPKAD, dan Inspektur Kabupaten Intan Jaya. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penilai Pemerintah memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya dalam kegiatan inventarisasi, verifikasi, validasi, dan penilaian aset daerah. Hasil penilaian aset menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan daerah, pemanfaatan aset, pemindahtanganan aset, serta penghapusan aset daerah. Namun demikian, pelaksanaan peran Penilai Pemerintah masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang penilaian aset, belum lengkapnya data dan dokumen aset daerah, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, kondisi geografis Kabupaten Intan Jaya yang cukup sulit dijangkau, serta belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah.

Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan peran Penilai Pemerintah meliputi peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis, inventarisasi dan pembaruan data aset secara berkala, penguatan sistem informasi pengelolaan aset daerah, peningkatan koordinasi antara BPPKAD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta penyediaan dukungan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai. Dengan optimalisasi peran Penilai Pemerintah, diharapkan pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Intan Jaya dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Penilai Pemerintah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Aset Daerah, BPPKAD, Kabupaten Intan Jaya.

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the role of Government Appraisers in the management of Regional Government Assets (Barang Milik Daerah/BMD) at the Regional Revenue, Financial Management and Asset Agency (BPPKAD) of Intan Jaya Regency, the obstacles encountered in carrying out this role, and the efforts made to optimize the role of Government Appraisers in regional asset management. This research employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The research involved seven informants consisting of the Head of BPPKAD, the Head of the Regional Asset Division, the Head of the Asset Disposal and Transfer Sub-Division, the Head of the Asset Planning and Administration Sub-Division, a Regional Asset Division staff member, the Secretary of BPPKAD, and the Inspector of Intan Jaya Regency. The collected data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the study indicate that Government Appraisers play a strategic role in the management of Regional Government Assets, particularly in asset inventory, verification, validation, and valuation activities. Asset valuation results serve as the basis for the preparation of regional financial statements, asset utilization, asset transfer, and asset disposal processes. However, the implementation of the Government Appraisers' role still faces several challenges, including limited human resources with expertise in asset valuation, incomplete asset data and documentation, inadequate supporting facilities and infrastructure, the challenging geographical conditions of Intan Jaya Regency, and suboptimal coordination among regional government agencies.

Efforts to optimize the role of Government Appraisers include improving human resource competencies through training and technical guidance, conducting periodic asset inventories and data updates, strengthening regional asset management information systems, enhancing coordination between BPPKAD and Regional Apparatus Organizations (OPDs), and providing adequate facilities, infrastructure, and budget support. By optimizing the role of Government Appraisers, it is expected that the management of Regional Government Assets in Intan Jaya Regency will become more effective, efficient, transparent, and accountable.

Keywords: Government Appraisers, Regional Government Asset Management, Regional Assets, BPPKAD, Intan Jaya Regency.